

Pelaporan Keberlanjutan: Alat untuk Membangun Kepercayaan dalam Transisi

Penulis : ICSP (SSH)
Keterangan : CONFERENCE HIGHLIGHTS
The 11th Sustainability Practitioner Conference (SPC) 2026 - "Driving Just Transition: From Strategy to Real Impact"
Sesi : Keynote Speech



Director of Regulatory Implementation IFRS Foundation, Emily Pierce, menjelaskan bahwa standar ISSB lahir dari kebutuhan pasar akan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan dapat dibandingkan. Kelompok pemangku kepentingan utamanya adalah investor, tetapi perusahaan juga diuntungkan karena proses menyusun informasi membantu mengenali risiko dan peluang serta memperkuat tata kelola data. Banyak yurisdiksi pun mendorong penerapannya untuk memperkuat pasar modal, meningkatkan efisiensi penerbit, dan mendukung tujuan kebijakan lain.

"Dengan semua pertimbangan tersebut, lebih dari 45 yurisdiksi telah memutuskan untuk menggunakan atau sedang mengambil langkah untuk menggunakan standar ISSB dalam kerangka hukum atau regulasinya. Itu merepresentasikan lebih dari 60% PDB global, 40% kapitalisasi pasar global, dan 60% emisi gas rumah kaca global. Standar ISSB benar-benar menjadi baseline global dan mendukung fondasi informasi mengenai isu-isu ini," kata Emily.

Standar ISSB terdiri atas IFRS S1 tentang risiko dan peluang keberlanjutan serta IFRS S2 tentang risiko dan peluang terkait iklim. Keduanya tidak terpisahkan dan dibangun di atas empat pilar rekomendasi TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures): tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. Untuk setiap risiko iklim, IFRS S2 mewajibkan perusahaan menjelaskan apakah itu risiko fisik atau risiko transisi, lalu mengungkapkan strategi, perubahan model bisnis dan alokasi sumber daya, upaya mitigasi dan adaptasi, analisis skenario iklim, serta emisi gas rumah kaca Cakupan 1, 2, dan 3.

"Penting untuk ditekankan di sini bahwa standar IFRS tidak mewajibkan perusahaan untuk menetapkan target, dan tidak mewajibkan perusahaan memiliki rencana transisi. Namun jika perusahaan memilikinya, mereka diwajibkan memberikan informasi tentang target dan rencana tersebut yang berguna bagi pengambilan keputusan investor," ujar Emily.



Sementara itu, CEO Global Reporting Initiative (GRI), Robin Hodess, menekankan bahwa pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah transisi akan terjadi, melainkan apakah transisi itu berjalan adil. Ia menilai isu ini relevan bagi Indonesia karena banyak pekerja, dunia usaha, dan komunitas masih terhubung erat dengan sektor batu bara dan industri padat energi. Karena itu, tantangannya bukan sekadar mengganti satu sumber energi dengan yang lain, melainkan mengelola perubahan sambil melindungi mata pencaharian dan menjaga ketahanan ekonomi.

"Transisi yang bergerak terlalu cepat tanpa perencanaan memadai dapat menimbulkan gejolak sosial. Transisi yang bergerak terlalu lambat dapat membuat negara dan perusahaan menghadapi risiko iklim, pasar, dan investasi yang terus meningkat. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan yang tepat," kata Robin.

Robin menyebut transisi yang berhasil harus memajukan tiga tujuan sekaligus: ambisi iklim, daya saing ekonomi, dan perlindungan pekerja, komunitas, serta hak asasi manusia. Pemangku kepentingan kini semakin menanyakan bagaimana target akan dicapai, siapa yang terdampak, dan bagaimana pekerja serta komunitas dilibatkan. Di sinilah pelaporan berperan: bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk manajemen dan pengambilan keputusan yang lebih baik, yang transparansinya menumbuhkan kepercayaan.

Pemikiran itu tercermin dalam GRI 102: Climate Change yang baru terbit tahun di mana diakui bahwa transisi iklim dan transisi berkeadilan tidak dapat dipisahkan. Bersama interoperabilitasnya dengan IFRS S2, standar ini diharapkan membantu organisasi menavigasi perkembangan pengungkapan keberlanjutan di Indonesia, termasuk kerangka pelaporan keberlanjutan OJK yang tengah berkembang. Robin juga mengaitkannya dengan proses akses Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan meningkatnya ekspektasi uji tuntas hak asasi manusia, yang semuanya menuntut organisasi memahami, mengelola, dan mengomunikasikan dampaknya.

"Just transition bukanlah trade-off terhadap pertumbuhan; ia justru menjadi fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Karena itu, Indonesia memiliki peluang unik untuk menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi, ambisi iklim, dan inklusi sosial dapat saling memperkuat. Dan keputusan yang diambil hari ini akan membentuk masa depan," ujar Robin.

Artikel ini merupakan CONFERENCE HIGHLIGHTS dari acara The 11th Sustainability Practitioner Conference (SPC) 2026 - "Driving Just Transition: From Strategy to Real Impact, khususnya pada sesi Keynote Speech.

Artikel ini tersedia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Versi Bahasa Indonesia disediakan untuk memudahkan akses bagi pembaca Indonesia.